

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada tahun 2003 Indonesia mengalami reformasi akuntansi keuangan sektor pemerintah yang ditandai dengan terbitnya tiga paket Undang-Undang Keuangan Negara diantaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Keuangan Negara didefinisikan sebagai segala bentuk hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang diterbitkan tahun 2010 menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus menjalankan akuntansi pemerintah berbasis akrual. Sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 36 (1) bahwa pelaksanaan akuntansi pemerintah untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual paling lambat dalam 5 (lima) tahun. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tersebut menggantikan peraturan

sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 karena sifatnya hanya sementara. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan dapat beralih dari akuntansi berbasis *Cash Toward Accrual* (CTA) menjadi akuntansi akrual penuh.

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 pemerintah dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangannya harus membuat laporan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang memberikan gambaran tentang sumber daya, alokasi, dan penggunaan dana yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan pelaksanaan anggaran selama periode waktu tertentu. Salah satu pos yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah pos belanja.

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, Belanja adalah setiap pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih pada periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Menurut klasifikasi ekonomi, belanja dibedakan menjadi empat jenis, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja lain-lain, dan belanja transfer. Belanja barang dan belanja pegawai termasuk dalam belanja operasional suatu entitas yang merupakan pos pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang menghasilkan manfaat jangka pendek.

Menurut Buletin Teknis No. 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, salah satu masalah yang menjadi tantangan bagi entitas pelaporan maupun entitas akuntansi adalah melakukan penyusunan perencanaan dan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena perencanaan dan anggaran belanja barang dan belanja pegawai rawan disalahgunakan. Contoh penyalahgunaan tersebut adalah adanya belanja barang dan belanja pegawai yang dicatat namun sebenarnya program kerja tersebut tidak terlaksana atau disebut dengan belanja fiktif.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk meninjau penerapan akuntansi belanja barang dan belanja pegawai di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jember. Penulis akan menjabarkannya dalam Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “Tinjauan atas Penerapan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Pegawai pada KPPN Jember”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah yang diangkat untuk karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan akuntansi belanja barang dan belanja pegawai pada KPPN Jember sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?
2. Bagaimana pengklasifikasian belanja barang dan belanja pegawai pada KPPN Jember?
3. Bagaimana pencatatan dan pengakuan belanja barang dan belanja pegawai pada KPPN Jember?

4. Bagaimana pengukuran belanja barang dan belanja pegawai pada KPPN Jember?
5. Apakah penyajian dan pengungkapan akuntansi belanja barang dan belanja pegawai pada KPPN Jember sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi belanja barang dan belanja pegawai pada KPPN Jember dengan peraturan yang berlaku
2. Untuk mengetahui pengklasifikasian belanja barang dan belanja pegawai pada KPPN Jember
3. Untuk mengetahui pencatatan dan pengakuan belanja barang dan belanja pegawai pada KPPN Jember
4. Untuk mengetahui proses pengukuran belanja barang dan belanja pegawai pada KPPN Jember
5. Untuk meninjau kesesuaian penyajian dan pengungkapan akuntansi belanja barang dan belanja pegawai pada KPPN Jember dengan ketentuan yang berlaku

### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Karya Tulis Tugas Akhir ini berisi tentang penerapan akuntansi belanja barang dan belanja pegawai pada KPPN Jember pada tahun 2021 yang meliputi lingkup bahasan diantaranya penjelasan, pengakuan, pengklasifikasian, pelaksanaan, pencatatan, penyajian dan pengungkapan belanja barang dan belanja pegawai.

Pembahasan Karya Tulis Tugas Akhir ini juga akan dibatasi pada peraturan-peraturan yang berlaku dan terkait dengan akuntansi belanja barang dan belanja pegawai.

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Manfaat yang ingin dicapai dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Karya tulis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait penerapan akuntansi belanja barang dan belanja pegawai pada KPPN Jember dan sebagai bentuk implementasi dari ilmu yang telah didapat dari perkuliahan khususnya akuntansi pemerintah.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Penulis

Melalui penulisan karya tulis ini, diharapkan penulis memperoleh tambahan pemahaman dan wawasan secara langsung tentang penerapan akuntansi belanja barang dan belanja pegawai.

##### b. Bagi KPPN Jember

Karya tulis ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam penerapan akuntansi belanja barang dan belanja pegawai sesuai dengan aturan yang berlaku.

c. Bagi Pembaca

Karya tulis ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menguraikan garis besar dari Karya Tulis Tugas Akhir yang memuat latar belakang penulisan, rumusan masalah penulisan, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan dan metode pengumpulan data.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini penulis memberikan penjelasan tentang teori-teori yang terkait dengan topik Karya Tulis Tugas Akhir yaitu akuntansi belanja barang dan belanja pegawai yang didapat melalui buku, literatur, peraturan yang berlaku dan sumber lain yang berhubungan dengan karya tulis ini.

### **BAB III METODE DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini memuat tentang metode pengumpulan data yang telah dilakukan penulis diantaranya studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Bab ini juga berisikan gambaran umum mengenai objek yang dipilih penulis dan hasil dari tinjauan yang telah dilakukan berdasarkan rumusan masalah yang terdapat di bab 1

### **BAB IV SIMPULAN**

Pada bagian ini penulis memberikan simpulan dari Karya Tulis Tugas Akhir yang telah diuraikan sebelumnya berkaitan dengan tinjauan penerapan akuntansi

belanja barang dan belanja pegawai pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jember serta memberikan saran dan masukan jika ditemukan perbedaan.